

Dinamika demokrasi pros prosedural vs demokrasi substantif di Indonesia pasca pemilu 2024: tantangan representasi dan partisipasi publik

Aprilla Mulidya

Perbankan Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250503110083aprillamaulidya@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi, partisipasi publik, reformasi hukum, demokrasi substantif, hukum tata negara.

Keywords:

Democracy, public participation, legal reform, substantive democracy, constitutional law.

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak era reformasi, terutama dalam bidang politik, hukum, dan ketatanegaraan. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi publik, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, pelaksanaan demokrasi di

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti populisme politik, rendahnya partisipasi masyarakat, penyebaran informasi palsu, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya partisipasi publik, demokrasi substantif, serta peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa demokrasi yang baik tidak hanya berorientasi pada prosedur formal seperti pemilu, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak warga negara. Selain itu, penguatan sistem hukum, reformasi ketatanegaraan, dan keberadaan lembaga negara yang independen menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

ABSTRACT

Democracy is a system of government that places the people as the ultimate holders of sovereignty in the life of the nation. The development of democracy in Indonesia has undergone significant changes since the Reformation era, particularly in the political, legal, and constitutional spheres. Democracy is not only about the conduct of general elections, but also encompasses public participation, law enforcement, the protection of human rights, and oversight of the government's operations. However, the practice of democracy in Indonesia still faces various challenges, such as political populism, low public participation, the spread of misinformation, and weak law enforcement. This study aims to explain the importance of public participation, substantive democracy, and the role of state institutions in maintaining democratic stability in Indonesia. The findings indicate that a well-functioning democracy is not merely focused on formal procedures like elections but must also foster social justice, public welfare, and the protection of citizens' rights. Furthermore, strengthening the legal system, constitutional reform, and the existence of independent state institutions are crucial factors in fostering a transparent and accountable government. Therefore, collaboration between the government and the public is essential to enhance the quality of democracy in Indonesia.

Pendahuluan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan pemilihan umum semata, tetapi juga mencakup penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak era reformasi tahun 1998 yang membawa perubahan besar terhadap sistem politik, hukum, dan ketatanegaraan negara.

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika politik nasional maupun internasional. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah munculnya populisme politik yang sering memanfaatkan isu identitas, agama, maupun kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan Masyarakat. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi masyarakat dan penguatan sistem hukum agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu (Wahyuni, 2004). Populisme politik yang berkembang tanpa diimbangi pendidikan politik yang baik dapat menyebabkan polarisasi sosial dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Selain itu, demokrasi modern juga dipengaruhi oleh perkembangan praktik politik global dan perubahan ideologi di berbagai negara. Fenomena demokrasi di Timur Tengah, misalnya, menunjukkan bahwa dinamika politik dan ideologi dapat memengaruhi stabilitas negara dan pelaksanaan demokrasi. Perkembangan demokrasi global menunjukkan bahwa konflik ideologi dan kepentingan politik dapat memengaruhi stabilitas negara dan pelaksanaan demokrasi di berbagai kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan keseimbangan antara kebebasan politik, stabilitas negara, dan penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum juga menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis membutuhkan keterlibatan masyarakat agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik. Reformasi hukum demokratis harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Soleh, 2005). Rian Arifin menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum merupakan bagian penting dalam reformasi hukum demokratis di Indonesia (Arifin, 2017). Dengan adanya partisipasi publik, proses pembentukan kebijakan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga berkaitan erat dengan konsolidasi sistem pemilu dan

penguatan lembaga negara. Selain itu, penguatan hukum tata negara diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi. Hukum tata negara memiliki fungsi penting dalam mengatur hubungan antar lembaga negara dan melindungi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi (Slamet et al., 2009).

Sub Pendahuluan

Perkembangan demokrasi di era modern membawa perubahan besar terhadap sistem politik, hukum, dan ketatanegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Demokrasi saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai pelaksanaan pemilihan umum secara berkala, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan terciptanya pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, seperti meningkatnya populisme politik, penyebaran informasi palsu melalui media sosial, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta konflik kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan penguatan tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada aspek substantif agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Konsep demokrasi substantif menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilu, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. R. Roziqin, Susiswo, dan Wahyu Jati Rusdianto menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus mampu menggabungkan pendekatan prosedural dan substantif agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas politik semata (Roziqin et al., 2023). Pendekatan substantif diperlukan agar demokrasi mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Selain itu, perkembangan demokrasi di Indonesia juga berkaitan dengan peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik dan konstitusi. Dalam sistem demokrasi, lembaga peradilan memiliki fungsi penting dalam menjaga supremasi hukum dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di sisi lain, pembentukan undang-undang melalui mekanisme omnibus law juga menimbulkan perdebatan mengenai konstitusionalitas dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Charles Simabura dan M. Nanda Fajri menjelaskan bahwa penerapan omnibus law harus tetap memperhatikan prinsip konstitusi dan keterlibatan publik agar tidak bertentangan dengan demokrasi (Simabura & Fajri, 2022).

Penguatan demokrasi juga memerlukan keberadaan lembaga independen yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan dan memberantas praktik penyalahgunaan

kekuasaan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam politik juga menjadi indikator penting dalam kualitas demokrasi modern. Badan Pengawas Pemilihan Umum menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam politik pasca Pemilu 2024 menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem demokrasi Indonesia (Bawaslu, 2025).

Pembahasan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perubahan global. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga menyangkut penegakan hukum, partisipasi publik, perlindungan hak warga negara, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Di Indonesia, demokrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah reformasi, terutama dalam bidang politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi berbagai tantangan yang memerlukan penguatan sistem demokrasi secara menyeluruh.

Menurut I Wayan Gde Suacana, demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi pergeseran antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif (Suacana, 2024). Demokrasi prosedural lebih menekankan pada pelaksanaan mekanisme formal seperti pemilu, sedangkan demokrasi substantif menekankan pada terciptanya kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya pemilu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan merata. Selain itu, perkembangan demokrasi modern juga dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi politik, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran berita palsu, propaganda politik, dan polarisasi sosial. Oleh sebab itu, pendidikan politik dan penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Sub Pembahasan

Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terdapat berbagai aspek penting yang memengaruhi kualitas sistem pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan, tetapi juga menyangkut partisipasi masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap lembaga negara. Perkembangan demokrasi modern juga dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan perubahan dinamika politik internasional yang membawa tantangan baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain itu, demokrasi yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas negara. Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat, munculnya populisme politik, penyebaran informasi palsu, hingga lemahnya penegakan hukum dalam beberapa kasus ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan demokrasi substantif yang tidak hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan berikut akan menjelaskan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan partisipasi publik, demokrasi substantif, peran lembaga negara, serta reformasi hukum dalam sistem demokrasi Indonesia.**1. Partisipasi Publik dalam Sistem Demokrasi**

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur utama dalam demokrasi karena masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik dan pengambilan kebijakan negara. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pemilu, penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, maupun keterlibatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi publik menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas pemerintahan yang demokratis. Menurut Rian Arifin, partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum merupakan bagian penting dalam reformasi hukum demokratis di Indonesia (Arifin, 2017). Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proses pembentukan hukum menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan legitimasi pemerintah karena kebijakan yang dihasilkan dianggap mewakili kepentingan rakyat. Namun, partisipasi publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pendidikan politik masyarakat, minimnya akses informasi, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik dan peningkatan transparansi pemerintahan agar masyarakat dapat lebih aktif dalam kehidupan demokrasi.

2. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif

Demokrasi prosedural merupakan demokrasi yang menitikberatkan pada pelaksanaan prosedur formal seperti pemilu, pergantian kekuasaan, dan pembentukan lembaga negara sesuai konstitusi. Sementara itu, demokrasi substantif lebih menekankan pada terciptanya keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, dan kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih sering berorientasi pada prosedur formal sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

R. Roziqin, Susiswo, dan Wahyu Jati Rusdianto menjelaskan bahwa demokrasi yang baik harus mampu menggabungkan pendekatan prosedural dan substantif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan (Rozikin et al., 2023). Demokrasi yang hanya berorientasi pada prosedur formal sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi substantif diperlukan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kekuasaan politik, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, I Wayan Gde Suacana menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia perlu bergerak menuju demokrasi substantif agar demokrasi mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata (Suacana, 2024). Dengan demikian, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Tantangan Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas sistem pemerintahan dan stabilitas politik negara. Salah satu tantangan utama adalah munculnya populisme politik yang memanfaatkan isu identitas, agama, dan kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan penyebaran berita bohong dan informasi yang tidak valid sehingga dapat memicu konflik sosial dan polarisasi politik di masyarakat. Pelaksanaan demokrasi memerlukan penguatan budaya hukum dan pendidikan politik agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara (Wahyuni, 2004). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda politik yang bersifat provokatif.

Di sisi lain, perkembangan demokrasi global juga menunjukkan bahwa konflik ideologi dan kepentingan politik dapat memengaruhi stabilitas negara. Perkembangan demokrasi global menunjukkan bahwa konflik ideologi dan kepentingan politik dapat memengaruhi stabilitas negara sehingga diperlukan penguatan pendidikan demokrasi dan persatuan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pendidikan demokrasi dan menjaga persatuan masyarakat agar konflik politik tidak menimbulkan perpecahan sosial.

4. Peran Lembaga Negara dalam Menjaga Demokrasi

Lembaga negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan menegakkan prinsip konstitusi. Dalam sistem demokrasi, lembaga negara berfungsi untuk mengatur jalannya pemerintahan, mengawasi penggunaan kekuasaan, serta melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, keberadaan lembaga negara yang

independen menjadi salah satu syarat penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam melakukan judicial activism terhadap peraturan partai politik guna menjaga prinsip demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Selain itu, keberadaan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas pemerintahan dan memberantas praktik korupsi. Independensi KPK merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena lembaga tersebut berfungsi mengawasi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya lembaga negara yang independen dan sistem hukum yang kuat, demokrasi dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

5. Reformasi Hukum dan Konstitusionalitas di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia juga berkaitan erat dengan reformasi hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu isu yang berkembang dalam reformasi hukum Indonesia adalah penerapan mekanisme omnibus law dalam pembentukan undang-undang. Charles Simabura dan M. Nanda Fajri menjelaskan bahwa penerapan omnibus law harus tetap memperhatikan prinsip konstitusi dan partisipasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan nilai demokrasi (Simabura & Fajri, 2022). Pembentukan hukum yang tidak melibatkan masyarakat secara maksimal dapat menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, hukum tata negara berfungsi sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak warga negara dalam sistem demokrasi (Slamet et al., 2009). Dengan adanya sistem hukum yang kuat dan konstitusional, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara lebih stabil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Setelah era reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan dalam bidang politik dan ketatanegaraan. Namun, pelaksanaan demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti populisme politik, penyebaran informasi palsu, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi publik menjadi salah satu

faktor penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Masyarakat memiliki hak untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara. Selain itu, demokrasi substantif perlu dikembangkan agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas politik semata. Demokrasi juga harus mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Keberadaan lembaga negara yang independen dan sistem hukum yang kuat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi. Reformasi hukum yang sesuai dengan prinsip konstitusi diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan secara adil dan transparan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat, demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi harus terus dilakukan agar sistem pemerintahan mampu berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan kepentingan rakyat.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi dan hak warga negara. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat lebih aktif dalam kehidupan politik dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan akses informasi yang transparan terkait kebijakan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi publik dalam sistem demokrasi dapat meningkat secara lebih optimal. Pemerintah dan lembaga negara juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan kedudukan atau jabatan seseorang. Hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan.

Lembaga negara yang independen seperti Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dijaga independensinya agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara maksimal. Pemerintah juga perlu memperkuat demokrasi substantif agar demokrasi tidak hanya berfokus pada prosedur formal seperti pemilu. Demokrasi harus mampu menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan hak masyarakat secara nyata. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Arifin, R. (2017). *Democracy on Indonesian Legal Reform : How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process*. 2(02), 155–158. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Representasi gender dalam kancah politik Indonesia: Tantangan dan peluang pasca Pemilu 2024*. E-Library Bawaslu. <https://www.e-lib.bawaslu.go.id/detail/3974e7a5-e982-4d7c-bf51-713a4e465f4b-1746528989/representasi-gender-dalam-kancah-politik-indonesia-tantangan-dan-peluang-pasca-pemilu-2024>
- Rozikin, Susiswo, & Rusdianto, W. J. (2023). *PENDEKATAN KONSEPTUAL ANTARA PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM*. 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i1.154>
- Simabura, C., & Fajri, M. N. (2022). *Jurnal Konstitusi & Demokrasi Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. 2(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1204>
- Slamet, S., Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). *E-demokrasi di indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis*. 2009(semnasIF), 85–93. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Soleh, A. K. (2005). *Islam dan demokrasi*. 3, 1–14. <https://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Suacana, I. W. G. (2024). *PEMILU 2024: TRANSISI PRAKTIK DEMOKRASI PROSEDURAL MENUJU DEMOKRASI SUBSTANTIF*. 1–4. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/2441/>
- Wahyuni, E. N. (2004). *Menyemai kultur good governance melalui pendidkan*. 7, 72–83. <https://repository.uin-malang.ac.id/384/>